

Membangun Etika Keberlanjutan di Era Ketidakadilan dan Krisis Ekologis

Theodorus Trichinas Payong Lewar ^{a,1}

^a Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia

¹ topanlewar195@gmail.com

Kata Kunci:

etika
keberlanjutan,
ekologi integral,
keadilan sosial,
solidaritas ekologis

Abstrak

Ketidakadilan sosial dan krisis ekologis merupakan dua wajah dari kegagalan etika pembangunan dan pola hidup manusia modern. Eksploitasi alam yang berlebihan, sistem ekonomi yang menindas, serta ketimpangan sosial yang meluas menunjukkan bahwa paradigma manusia sebagai pusat dalam moralitas tidak lagi memadai. Tulisan ini berupaya membangun konsep *etika keberlanjutan* yang berakar pada prinsip *ekologi integral*, guna menghadirkan kesatuan moral antara manusia, masyarakat, dan alam. Pendekatan ini menuntut tanggung jawab etis untuk merawat bumi sekaligus memperjuangkan keadilan sosial sebagai dua dimensi yang tak terpisahkan dari kehidupan moral. Melalui analisis filosofis dan refleksi atas ajaran sosial, tulisan ini menawarkan pembaruan pandangan moral: bahwa keberlanjutan hanya dapat diwujudkan melalui solidaritas ekologis dan sosial yang berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat seluruh ciptaan. Dengan demikian, *etika keberlanjutan* tidak hanya menjadi wacana ekologis, tetapi sebuah panggilan moral untuk menata ulang relasi manusia dengan sesama dan alam demi masa depan bersama yang adil dan berkelanjutan.

Building an Ethics of Sustainability in an Era of Inequality and Ecological Crisis

Keywords:

sustainability
ethics, integral
ecology, social
justice, ecological
solidarity

Abstract

Social injustice and ecological crisis are two faces of the failure of development ethics and modern human lifestyles. Excessive exploitation of nature, oppressive economic systems, and widespread social inequality show that the paradigm of humans as the centre of morality is no longer adequate. This paper attempts to construct a concept of sustainability ethics rooted in the principles of integral ecology, in order to present a moral unity between humans, society, and nature. This approach demands ethical responsibility to care for the earth while fighting for social justice as two inseparable dimensions of moral life. Through philosophical analysis and reflection on social teachings, this paper offers a renewed moral perspective: that sustainability can only be achieved through ecological and social solidarity based on respect for the dignity of all creation. Thus, sustainability ethics is not merely an ecological discourse, but a moral call to reorder human relations with one another and with nature for a just and sustainable shared future.

Pendahuluan

Latar Belakang

Dewasa ini, ketidakadilan sosial dan krisis ekologis saling berperang dan memperlihatkan wajah kegagalan etika modern. Masalah-masalah seputar ketidakadilan dan krisis ekologi menjadi marak terjadi dalam dunia yang semakin hari, senantiasa mengalami krisis. Di satu sisi, ketimpangan ekonomi semakin lebar: segelintir elite menguasai sebagian besar kekayaan dunia, sementara jutaan orang hidup dalam kemiskinan esktrm. Menurut data BPS (Badan Pusat Stastistik) Maret 2025. Disisi lain, perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan degradasi lingkungan mengancam keberlanjutan bumi sebagai rumah bersama. Kedua fenomena ini berakar dari cara pandang antroposentris, di mana manusia menempatkan dirinya sebagai pusat realitas dan ukuran moralitas. Hal ini merupakan fenomena paling serius karena selalu menempatkan manusia sebagai pihak yang harus dilayani kepentingannya dan

sebagai *res cogitans* (makhluk berpikir dengan kedudukan lebih tinggi).¹ Alam dipandang sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan dan ambisi manusia, bukan sebagai komunitas kehidupan yang memiliki nilai intrinsik. Sehingga dari hal ini memicu terjadinya tren gaya hidup konsumtif, ekonomi eksploitasi, dan teknologi tanpa etika.

Frans Magnis-Suseno menegaskan bahwa dibalik krisis sosial dan ekologis terdapat krisis moral yang mendasar: manusia modern kehilangan orientasi etisnya terhadap kebaikan bersama (*bonnum commune*) dan menggantinya dengan kepentingan pribadi dan keuntungan jangka pendek.² Krisis ekologis inilah yang pada hakikatnya menjadi krisis moral manusia modern. Krisis ekologis bukan hanya dipandang sebagai masalah teknis yang bisa diselesaikan dengan inovasi teknologi semata. Masalah ini merupakan gejala kegagalan etika pembangunan, di mana kemajuan ekonomi justru berdiri di atas penderitaan sosial dan kerusakan ekologis dengan ciri pembangunan kapitalistik yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai nilai tertinggi, mengabaikan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Sehingga etika pembangunan yang hanya berorientasi pada efisiensi dan profit, mengorbankan martabat manusia dan martabat ciptaan lainnya. Lebih jelas, Paus Fransiskus menyebut ini sebagai 'krisis ekologis yang bersumber pada krisis moral manusia' di mana manusia gagal melihat keterpaduan antara dirinya, sesama, dan alam.³

Krisis ekologis dan ketidakadilan sosial tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan ekonomi atau inovasi teknologi. Ini merupakan bagian dari kegagalan etika pembangunan. Ketika pembangunan tidak berlandaskan pada nilai moral yang adil dan berkelanjutan, ia akan berubah menjadi alat penindas baru yang menindas kaum miskin dan merusak lingkungan sehingga bukanlah menjadi sebuah kemajuan yang baik tetapi bentuk lain dari kemunduran moral.⁴ Karena itu, membangun etika keberlanjutan berarti menata kembali dasar moral pembangunan agar berpihak pada keadilan sosial dan ekologis. Etika keberlanjutan memperluas horizon moral: dari relasi "aku-engkau" menuju relasi "aku-kami-alam semesta", sehingga solidaritas ekologis menjadi tanggung jawab moral baru untuk memicu perubahan gaya hidup, sistem

¹ Wilhelmus Kelvin, Eugenius M Darmawan, "Antroposentrisme, Teknokrasi, dan Krisis Pembangunan: Menuju Paradigma Teosentris," *Apostolicum: Jurnal Pendidikan Keagamaan Katolik Ledalero* 1, no. 1 (Maret 2025): 113.

² Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 75-78.

³ Paus Fransiskus, *Laudato Si' - On Care for Our Common Home* (Vatikan, 2015), no. 119-121.

⁴ Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi, "Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia," *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (Juni 2020): 62-63.

ekonomi, dan spiritualitas modern. Oleh karena itu membangun etika keberlanjutan berarti membangun kesadaran baru tentang tanggung jawab bersama, di mana keberlanjutan bukan hanya urusan teknis, tetapi panggilan etis untuk menjaga martabat seluruh ciptaan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan, tampak bahwa era modern dihadapkan pada dua krisis besar yang saling berkaitan: ketidakadilan sosial dan kerusakan ekologis. Kedua persoalan ini bukan sekadar gejala ekonomi atau lingkungan, tetapi mencerminkan krisis moral dan etika pembangunan manusia. Paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat moralitas telah gagal menumbuhkan tanggung jawab terhadap alam dan sesama. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan untuk membangun suatu etika keberlanjutan, sebuah kerangka moral baru yang dapat menjawab persoalan ketidakadilan sosial sekaligus krisis ekologis secara terpadu. Etika ini diharapkan mampu memperluas horizon moralitas manusia, dari yang semula hanya berorientasi pada sesama manusia, menjadi kesadaran akan tanggung jawab bersama terhadap seluruh ciptaan. Berangkat dari persoalan tersebut, tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok berikut:

1. Bagaimana hubungan antara ketidakadilan sosial dan krisis ekologi dapat dilihat sebagai satu krisis etis?
2. Mengapa paradigma etika antroposentris (manusia sebagai pusat) perlu diganti?
3. Prinsip-prinsip apa dalam *ekologi integral* yang bisa menjadi dasar etika keberlanjutan?
4. Apa bentuk tanggung jawab moral manusia terhadap alam dan masyarakat dalam konteks sekarang?

Metode

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis refleksi dan filosofi untuk membangun etika keberlanjutan. Pendekatan ini dipilih untuk menanggapi masalah yang terjadi di tengah era digital yang mengakibatkan adanya ketidakadilan sosial dan krisis ekologis yang bersifat empiris. Dengan menggunakan pendekatan refleksi-filosofis, penulis berupaya memahami penyebab persoalan moral yang melatarbelakangi krisis tersebut, serta mencari bagaimana pandangan antroposentris telah menggeser kesadaran etis manusia terhadap alam dan sesamanya.

Kajian ini dilakukan melalui analisis literatur terhadap karya-karya dari para tokoh yang memiliki relevansi dengan topik ini, seperti Frans Magnis-

Suseno mengenai krisis modernitas, Paus Fransiskus dalam *Laudato Si'* tentang ekologi integral, Leonardo Boff tentang spiritual ekologis, Hans Jonas tentang tanggung jawab etis terhadap masa depan kehidupan, dan Emmanuel Levinas mengenai tanggung jawab terhadap 'yang lain'. Melalui kajian tersebut, penulis melakukan refleksi teologis dan filosofi sebagai Upaya untuk menafsirkan Kembali relasi antara manusia dengan sesama serta dengan alam sebagai satu kesatuan moral.

Metode ini bersifat deskriptif-analitis dan reflektif, dengan tujuan untuk menyingkapi keterkaitan antara ketidakadilan sosial dan krisis ekologis yang Tengah terjadi sebagai satu krisis moral yang saling berkaitan. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya merumuskan kerangka etika keberlanjutan yang berakar pada solidaritas sosial dan ekologis, serta penghormatan terhadap martabat seluruh ciptaan sebagai fondasi kehidupan bersama yang adil dan berkelanjutan.

Pembahasan

Krisis Etika di Era Ketidakadilan dan Krisis Ekologis

Laporan Bank Dunia (2024) menunjukkan bahwa 10% penduduk dunia menguasai lebih dari 75% kekayaan global. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi (rasio Gini) masih bertahan di angka 0,388, mengindikasikan kesenjangan yang serius.⁵ Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2024) melaporkan angka deforestasi netto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektar. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektare (92,8%), di mana 69,3% terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan.⁶

Krisis ekologis dan ketidakadilan sosial pada hakikatnya adalah dua sisi dari kerapuhan moral yang sama. Ketika manusia memandang alam semata sebagai objek produksi, eksploitasi terhadap bumi berjalan seiring dengan eksploitasi terhadap sesama manusia. Sistem ekonomi global yang berlandaskan keuntungan tanpa batas menciptakan *ekonomi eksploitatif*, di mana sumber daya alam diperas hingga habis sementara kelompok miskin dan

⁵ Badan Pusat Statistik, "Gini Ratio Maret 2025 Tercatat Sebesar 0,375," BPS, 25 Juli 2025, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2025/07/25/2519/gini-ratio-maret-2025-tercatat-sebesar-0-375.html> (diakses 18 Oktober 2025).

⁶ "Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024," *Siaran Pers*, Kementerian Kehutanan, 20 Maret 2025, SP. 031/HKLN/PIIP/HMS.3/03/2025, <https://www.kehutan.go.id/news/article-10> (diakses 18 Oktober 2025)

lemah menanggung akibat ekologisnya. Dengan demikian, 'eksploitasi alam adalah bentuk lain dari eksploitasi manusia', keduanya saling memperdalam luka moral peradaban modern. Frans Magnis-Suseno menyebut fenomena ini sebagai "kegagalan moral modernitas," ketika pembangunan tidak lagi berorientasi pada kebaikan bersama (*bonum commune*), melainkan pada kepentingan ekonomi semata. Manusia modern, katanya, telah "kehilangan kepekaan moral terhadap penderitaan sesamanya dan terhadap bumi yang mereka rusak sendiri." Ketika moralitas tunduk pada efisiensi, nurani kehilangan arah, dan etika kehilangan daya koreksi terhadap sistem ekonomi yang eksploitatif.⁷

Paus Fransiskus dalam *Laudato Si'* menegaskan bahwa "tidak ada dua krisis terpisah, satu lingkungan dan satu sosial, melainkan satu krisis kompleks yang bersifat sosio-ekologis." Pernyataan ini mempertegas pandangan Magnis bahwa kerusakan alam tidak bisa disembuhkan tanpa membenahi relasi sosial yang timpang. Dengan kata lain, krisis ekologis adalah cermin dari krisis kemanusiaan. Akar krisis ini berakar pada keserakahan struktural yang dilembagakan dalam sistem kapitalisme global. Logika "pertumbuhan tanpa moral" menyingkirkan pertimbangan etis dalam pembangunan dan produksi. Kemajuan ekonomi menjadi ukuran tunggal kesejahteraan, padahal kemajuan semacam itu kerap dibangun di atas penderitaan ekologis dan sosial.

Frans Magnis-Suseno menyebut kondisi ini sebagai "kegagalan moral modernitas", di mana manusia kehilangan orientasi pada kebaikan moral, dan menggantinya dengan rasionalitas instrumental yang mengejar efisiensi serta keuntungan pribadi.⁸ Dalam konteks ini, krisis ekologis tidak dapat dipisahkan dari kegagalan hati nurani moral manusia. Magnis menegaskan bahwa etika sejati dimulai dari kesadaran akan *yang baik*, yakni pengakuan terhadap martabat setiap ciptaan. Namun, dalam dunia yang dikuasai logika pasar, hati nurani kehilangan kepekaan terhadap penderitaan ekologis dan sosial. Alam dipandang sekadar "alat produksi", sementara manusia lain dianggap "tenaga kerja murah". Ketika nurani tersumbat, relasi moral yang seharusnya menyatukan manusia dan alam berubah menjadi relasi dominasi dan penguasaan. Kegagalan berikutnya ialah pudarnya solidaritas sosial.

Dalam *Etika Sosial*, Magnis-Suseno menulis bahwa masyarakat modern mengalami krisis solidaritas karena sistem sosial-ekonomi menumbuhkan *egoisme sistemik*: setiap individu berjuang demi kepentingan sendiri, tanpa memperhatikan akibatnya bagi sesama.⁹ Solidaritas yang seharusnya menjadi

⁷ Frans Magnis-Suseno, *Etika Sosial: Dasar dan Prinsip Hidup Bersama* (Jakarta: Gramedia, 1987), 132.

⁸ Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 80.

⁹ Frans Magnis-Suseno, *Etika Sosial: Dasar dan Prinsip Hidup Bersama* (Jakarta: Gramedia, 1987), 132.

dasar kehidupan bersama tergerus oleh kompetisi dan individualisme. Akibatnya, krisis ekologis pun menjadi krisis kemanusiaan: hutan-hutan ditebangi tanpa tanggung jawab, sungai-sungai diracuni limbah industri, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal akibat bencana ekologis yang mereka sendiri tidak sebabkan. Contoh nyata dapat ditemukan dalam kasus deforestasi di Kalimantan dan Papua, yang bukan hanya merusak ekosistem lokal tetapi juga mengusir masyarakat adat dari tanah leluhurnya.¹⁰ Ketika alam dieksploitasi, manusia yang bergantung padanya juga turut tereksploitasi. Fenomena serupa terjadi pada ketimpangan ekonomi global: negara-negara berkembang yang kaya sumber daya menjadi korban ketamakan korporasi transnasional yang mengambil untung besar tanpa memperhatikan kesejahteraan lokal. Sementara itu, migrasi ekologis perpindahan paksa akibat perubahan iklim menjadi bukti bahwa kerusakan lingkungan langsung berimbas pada martabat manusia.

Dengan demikian, krisis ekologis dan ketidakadilan sosial merupakan dua dimensi dari kegagalan moral modernitas. Seperti ditegaskan oleh Magnis-Suseno, tanpa kesadaran akan kebaikan dan solidaritas, manusia akan terus memperlakukan alam dan sesamanya sebagai alat. Dalam terang ajaran *Laudato Si'*, tugas etika keberlanjutan ialah memulihkan kembali nurani dan solidaritas sosial agar pembangunan tidak lagi bertumpu pada logika pasar, melainkan pada penghormatan terhadap martabat seluruh ciptaan.

Dari Antroposentrisme Menuju Ekologi Integral

Krisis ekologis yang dihadapi dunia modern berpangkal pada paradigma antroposentris, yaitu pandangan bahwa manusia adalah pusat dan penguasa alam. Dalam paradigma ini, nilai moral hanya diberikan kepada manusia, sementara alam dianggap semata sebagai sarana untuk mencapai kepentingan manusia. Pandangan ini melahirkan logika dominasi: manusia merasa berhak menaklukkan, mengatur, dan mengeksploitasi bumi tanpa batas. Ada keyakinan dalam antroposentrisme bahwa manusia adalah penguasa dan penentu realitas, dan merekalah yang akan menentukan apa yang menjadi dan terjadi pada diri mereka sendiri. Antroposentrisme juga sering mengakui beberapa kesalahan non-intrinsik dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia yang menyebabkan rusaknya kesejahteraan manusia sekarang dan di masa akan datang, karena keberadaan dan kesejahteraan manusia

¹⁰ Efraim Mangaluk, "Deforestasi dan Punahnya Kebudayaan Papua," *Kompas*, 24 Agustus 2024, diakses 18 Oktober 2025, <https://www.kompas.id/artikel/deforestasi-dan-punahnya-kebudayaan-papua>.

bergantung pada lingkungan yang berkelanjutan.¹¹ Pandangan antroposentris semakin menguat melalui tradisi Skolastik yang menekankan adanya hirarki dalam tatanan ciptaan. Thomas Aquinas menempatkan manusia sebagai makhluk rasional dengan kedudukan tertinggi dalam *ordo entium* (tatanan keberadaan), di mana makhluk yang lebih rendah dianggap diciptakan untuk menunjang keberadaan manusia. Dalam kerangka ini, alam dipandang memiliki nilai sejauh ia berguna bagi manusia semata, suatu pandangan yang menegaskan nilai instrumental ciptaan.¹²

Pandangan hierarkis ini kemudian diperkuat oleh filsafat modern yang menekankan rasionalitas dan dominasi manusia atas alam. Descartes, misalnya, memahami alam sebagai *res extensa*, benda mati yang dapat dikuasai melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandangan ini memperdalam jarak antara manusia dan alam, serta menjustifikasi eksploitasi ekologis atas nama kemajuan. Akibatnya, hal inilah yang menjadi akar krisis moral dan ekologis dunia modern. Dalam pandangan ini, hubungan manusia dengan bumi kehilangan dimensi etis dan spiritualnya. Karena itu, dibutuhkan paradigma baru yang memulihkan kesadaran akan kesatuan moral antara manusia dan seluruh ciptaan, seperti yang ditawarkan dalam gagasan ekologi integral.

Paus Fransiskus dalam ensiklik *Laudato Si'* menawarkan paradigma baru: ekologi integral, yaitu cara pandang yang mempersatukan manusia, masyarakat, dan alam sebagai satu kesatuan moral. Ekologi integral bukan hanya soal pelestarian lingkungan, tetapi juga keadilan sosial dan tanggung jawab etis terhadap seluruh ciptaan. Paradigma ini mengoreksi kesalahan modernitas yang memisahkan antara manusia dan alam, serta menolak dikotomi antara etika sosial dan etika ekologis. Hal ini juga mengarisbawahi konsep *care for our common home* sebagai panggilan moral dan spiritual dan bukan sekadar kewajiban ekologis atau sosial.¹³ *Laudato Si'* menegaskan bahwa ekologi integral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keadilan sosial, kehidupan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Dalam dokumen *Laudato Si'* no. 139 ditulis:

“.....Kita adalah bagian dari alam, termasuk di dalamnya, dan terjalin dengannya. Menjawab pertanyaan mengapa tempat tertentu tercemar memerlukan suatu studi tentang cara kerja masyarakat, ekonominya, perilakunya, cara mereka memahami realitas. Mengingat skala perubahan,

¹¹ M. Ied Al Munir, “Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme,” *Jurnal Yaqzhan* 9 no. 1 (Juni 2023): 28.

¹² Oktavianus Gili Leo, “Berteologi Hijau di Tengah Dunia yang Terluka: Pergeseran Paradigma dari Antroposentrisme menuju Ekosentrisme,” *Jurnal Akademika* 24, no. 2 (Januari-Juni 2025): 175.

¹³ Maria Helena Wenehenubun, “Pendekatan Ekologi Integral Untuk Mengatasi Krisis Lingkungan Hidup Menurut Paus Fransiskus,” *Logos: Jurnal Pendidikan, Katekese, dan Pastoral* 13, no. 1 (Juni 2025): 24.

tidak mungkin lagi untuk menemukan jawaban yang spesifik dan independen untuk setiap bagian masalah. Sangat penting untuk mencari solusi komprehensif yang memperhitungkan interaksi sistem-sistem alam yang satu dengan yang lain, juga dengan sistem-sistem sosial. Tidak ada dua krisis yang terpisah, yang satu menyangkut lingkungan dan yang lain sosial, tapi satu krisis sosial lingkungan yang kompleks. Pedoman untuk solusi membutuhkan sebuah pendekatan integral untuk memerangi kemiskinan, memulihkan martabat orang yang dikucilkan, dan pada saat yang sama melestarikan alam.”¹⁴

Paus Fransiskus menolak pandangan lama yang memisahkan krisis sosial dari krisis ekologis, yang pada hakikatnya merupakan satu realitas yang tak dapat dipisahkan. Paus Fransiskus mengajak untuk melihat bahwa akar kerusakan ekologis terletak pada cara masyarakat membangun sistem sosial dan ekonominya. Ketika ekonomi dijalankan tanpa moralitas, ketika kemajuan diukur hanya dengan keuntungan, dan ketika kemiskinan dianggap sekadar angka statistik, maka struktur masyarakat itu sendiri menjadi tidak manusiawi. Dalam situasi ini, alam dan manusia miskin menjadi korban yang sama dari sistem yang eksploitatif. Di Indonesia, misalnya, deforestasi di Papua bukan hanya merusak keanekaragaman hayati, tetapi juga menggusur masyarakat adat dari tanah leluhurnya. Dalam arti ini, ketidakadilan ekologis adalah juga ketidakadilan sosial. Mereka yang paling sedikit menyumbang terhadap krisis lingkungan justru paling banyak menanggung penderitaannya. Karena itulah, Paus Fransiskus menekankan pentingnya pendekatan ekologi integral, sebuah cara berpikir yang menyatukan dimensi ekologis, sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual. Ia mengajak untuk mencari solusi yang komprehensif dan saling terhubung, sebab setiap sistem alam berinteraksi dengan sistem sosial. Ekologi integral menuntut manusia untuk menata kembali hubungan dengan bumi, sesama, dan Allah dalam kesatuan moral yang utuh. Ekologi integral juga mengakui dimensi moral dan spiritual dalam mengatasi masalah lingkungan. Paus Fransiskus menekankan bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab moral yang harus dipikul oleh seluruh umat manusia. Alam adalah anugerah dari Sang Pencipta yang harus dijaga dengan rasa syukur dan hormat. Selain itu, kasih sayang dan penghargaan terhadap makhluk hidup mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendalam, yang mendorong manusia untuk bertindak dengan tanggung jawab dalam melindungi lingkungan.¹⁵ Ia menolak solusi parsial yang hanya

¹⁴ Fransiskus, *Laudato Si’: Tentang Perhatian terhadap Rumah Kita Bersama* (Jakarta: Dokpen KWI, 2015), no. 139.

¹⁵ Maria Helena Wenehenubun, “Pendekatan Ekologi Integral Untuk Mengatasi Krisis Lingkungan Hidup Menurut Paus Fransiskus,” *Logos: Jurnal Pendidikan, Katekese, dan Pastoral* 13, no. 1 (Juni 2025): 40.

memperbaiki satu sisi persoalan, karena krisis ekologis dan krisis sosial bersumber dari akar yang sama: kegagalan etika modernitas. Etika keberlanjutan yang sejati harus berakar pada spiritualitas ekologis: suatu keyakinan bahwa kita hidup bukan di atas bumi, melainkan bersama bumi; bukan sebagai penguasa atas ciptaan, melainkan sebagai penjaga dan sesama ciptaan dalam rumah bersama yang rapuh namun kudus.¹⁶ Dalam perspektif etika, krisis ekologis menyingkap kegagalan hati nurani moral manusia modern. Seperti dikatakan oleh Franz Magnis-Suseno, manusia modern kehilangan kesadaran akan “yang baik” karena tertutup oleh logika efisiensi, kompetisi, dan keuntungan pribadi.¹⁷ Dalam situasi ini, rasionalitas instrumental menggantikan orientasi moral terhadap kebaikan. Akibatnya, tindakan manusia tidak lagi diukur berdasarkan nilai etis, melainkan sejauh mana ia menguntungkan secara material. Ketika etika sosial lumpuh oleh egoisme *sistemik*, sebagaimana dikatakan Magnis, solidaritas sosial ikut runtuh, dan alam bersama manusia miskin menjadi korban dari sistem tanpa nurani.¹⁸

Leonardo Boff dalam teologinya juga ditemukan adanya prinsip-prinsip yang sama dengan dokumen *Laudato Si'*. Dalam karyanya *Cry of the Earth, Cry of the Poor* (1997) dan *Ecology and Liberation* (1995), Boff menulis bahwa manusia dan bumi “berasal dari rahim yang sama” dan “terjalin dalam jejaring kehidupan yang kudus.” Keterhubungan antara manusia dan seluruh ciptaan melahirkan spiritualitas persaudaraan dan persahabatan kosmik, suatu kesadaran bahwa semua makhluk saling menata, merawat, dan menopang kehidupan. Leonardo Boff menyebutnya sebagai *mutuality*, yakni panggilan hidup dalam semangat penatalayanan yang penuh kasih, di mana manusia dan seluruh ciptaan saling terhubung dalam persekutuan kasih yang saling memberi dan memelihara kehidupan.¹⁹ Dalam spiritualitas ini, kasih tidak terbatas hanya pada sesama manusia, tetapi meluas hingga mencakup bumi, air, udara, hewan, tumbuhan, dan segala ciptaan lain yang turut berbagi keberadaan di dalam rahim kosmos. Inilah yang disebutkan oleh Boff sebagai etika teologi. Boff memaknai etika ekologi sebagai kesadaran bahwa seluruh ciptaan membentuk satu kesatuan keluarga kosmis, di mana setiap makhluk memiliki martabat dan perannya masing-masing sehingga tidak ada yang boleh saling melukai, menindas, atau merusak bumi sebagai rumah bersama

¹⁶ Maria Helena Wenehenubun, “Pendekatan Ekologi Integral Untuk Mengatasi Krisis Lingkungan Hidup Menurut Paus Fransiskus,” *Logos: Jurnal Pendidikan, Katekese, dan Pastoral* 13, no. 1 (Juni 2025): 33.

¹⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 20-21.

¹⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Sosial: Dasar dan Prinsip Hidup Bersama* (Jakarta: Gramedia, 1987), 37-39.

¹⁹ Buca A. Ranboki, “Menemukan Teologi Leonardo Boff Dalam Ensiklik Paus Fransiskus *Laudato Si'*,” *Indonesian Journal of Theology* 5, no. 1 (Juli 2017): 52.

yang juga dipandang sebagai saudara dan ibu yang menumbuhkan serta memelihara kehidupan.²⁰ Etika kosmik ini menjadi dasar moral yang perlu dihidupi dalam membangun masa kini dan masa depan yang berkelanjutan.

Dalam terang ekologi integral yang digagas Paus Fransiskus, pemikiran Leonardo Boff menjadi gema profetis yang memperluas horizon iman dan moralitas manusia modern. Baik *Laudato Si'* maupun teologi Boff sama-sama mengingatkan bahwa kehidupan tidak dapat dipahami secara terpisah: manusia, masyarakat, dan bumi adalah bagian dari satu jaringan relasi yang kudus. Dalam jejaring ini, setiap ciptaan memancarkan nilai dan martabat yang tak dapat digantikan. Maka, etika ekologi yang lahir dari spiritualitas kosmik bukan sekadar ajakan untuk menjaga lingkungan, tetapi panggilan untuk membangun persekutuan kasih universal (*universal communion*), tempat manusia menempatkan diri bukan sebagai penguasa melainkan sebagai penjaga dan pelayan kehidupan. Di sinilah inti dari ekologi integral: memulihkan harmoni antara manusia, alam, dan Allah; mengembalikan bumi ke martabatnya sebagai rumah bersama yang kudus. Dengan demikian, membangun masa depan yang berkelanjutan berarti menumbuhkan kesadaran batin bahwa setiap tindakan merawat bumi adalah tindakan merawat kemanusiaan sendiri. Peralihan dari antroposentrisme menuju ekologi integral bukan hanya transformasi cara berpikir, melainkan pertobatan moral dan spiritual umat manusia untuk kembali menemukan jati dirinya sebagai makhluk relasional dalam kasih Allah dan seluruh ciptaan-Nya.

Etika Keberlanjutan sebagai Tanggung Jawab Moral Dan Sosial

Dalam horizon filsafat moral, tanggung jawab keberlanjutan memiliki dimensi ontologis: manusia bukan hanya "aktor moral", tetapi bagian dari jaringan kehidupan yang eksistensinya saling tergantung. Hans Jonas menyebut hal ini sebagai *ethic of futurity*, sementara Emmanuel Levinas menegaskan bahwa "yang lain" (the Other) tidak hanya berarti sesama manusia, tetapi juga seluruh ciptaan yang menatap manusia dengan "wajah tanggung jawab." Tanggung jawab menurut Emmanuel Levinas bukanlah hasil pilihan, melainkan panggilan etis yang mendahului eksistensi manusia. Ia bersifat tanpa batas, tanpa pamrih, dan menolak dominasi atas yang lain.²¹ Dalam konteks ekologis, tanggung jawab ini berarti menyadari bahwa seluruh ciptaan adalah "yang lain" yang menatap manusia dan menuntut perlindungan.

²⁰ Ibid.,

²¹ Kosmas Sobon, "Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafat Emmanuel Levinas," *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 60-61.

Karena itu, etika keberlanjutan sejati lahir dari kesadaran Levinasian bahwa hidup bersama ciptaan adalah tanggung jawab moral yang tak dapat ditawar.

Etika keberlanjutan tidak cukup dimengerti sebagai kewajiban ekologis, tetapi sebagai **tanggung jawab moral dan sosial**. Hans Jonas, dalam *The Imperative of Responsibility*, menyatakan bahwa kemajuan teknologi modern menimbulkan konsekuensi moral baru: manusia kini memiliki kekuasaan untuk menghancurkan kehidupan di bumi, sehingga tanggung jawab moralnya pun harus diperluas ke masa depan dan generasi mendatang.²² Hans Jonas menggunakan paham tentang teleologi untuk menjelaskan tujuan intrinsik alam. Bahwasanya, apa pun yang ada mempunyai tujuan dan ada demi tujuan itu. Alam menunjukkan tujuannya dalam apa yang dikembangkannya.²³ Hans Jonas menggunakan teleologi untuk memberi argumen filosofis bahwa alam tidak netral dan tidak pasif, tetapi memiliki tujuan intrinsik. Hal ini mendasari etika tanggung jawab manusia terhadap lingkungan: kita bukan penguasa yang sewenang-wenang, tapi penjaga arah dan tujuan alam.

Manusia mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan alam. Alam dipandang sebagai amanah yang dipercayakan kepada manusia dan menuntut penghormatan bukan semata karena kegunaannya bagi manusia, tetapi juga karena memiliki nilai dan hak yang melekat secara intrinsik. Prinsip tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Jonas memberikan kerangka pemikiran yang relevan untuk menangani krisis etika lingkungan. Pendekatan etis Jonas tidak hanya menilai konsekuensi tindakan manusia terhadap alam pada saat ini, tetapi juga memperhitungkan potensi dampak negatifnya di masa depan. Dengan demikian, manusia tidak boleh semata-mata memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya, melainkan juga memiliki kewajiban moral untuk merawat dan menjaga kelestarian serta keutuhan lingkungan hidup.²⁴

Etika keberlanjutan sejati mengintegrasikan dimensi moral individual dan tanggung jawab sosial-kolektif. Solidaritas ekologis menuntut kesadaran bahwa kesejahteraan manusia dan alam saling terkait, sehingga tanggung jawab moral harus diwujudkan melalui tindakan bersama, kebijakan publik, pendidikan lingkungan, dan praktik sosial yang memperkuat kelestarian bumi. Dari perspektif ini, menjadi manusia yang bermoral berarti mengemban

²² Laurentius Florido Atu, Petrus Fonsensus Loran Oke, "Hans Jonas dan Tanggung Jawab Etika: Jawaban Atas Krisis Ekologi di Indonesia," *Indonesian Character Journal* 2, no. 1 (Januari 2025): 11.

²³ Laurentius Florido Atu, Petrus Fonsensus Loran Oke, "Hans Jonas dan Tanggung Jawab Etika: Jawaban Atas Krisis Ekologi di Indonesia," *Indonesian Character Journal* 2, no. 1 (Januari 2025): 11.

²⁴ *Ibid.*, 12.

tanggung jawab etis tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap seluruh ciptaan dan generasi yang akan datang, sehingga etika keberlanjutan muncul sebagai bentuk moralitas publik baru yang menekankan tanggung jawab kolektif untuk masa depan planet ini.

Spiritualitas Keberlanjutan: Martabat Ciptaan dan Solidaritas Universal

Setiap etika yang sejati berakar pada 'spiritualitas yang memulihkan kesadaran akan martabat ciptaan'. Spiritualitas keberlanjutan menuntut manusia untuk melihat dunia bukan sebagai benda mati, tetapi sebagai *rumah bersama* (*common home*) yang dihuni oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Magnis-Suseno menyebut dimensi spiritual ini sebagai 'kesadaran transenden dalam etika' yakni kemampuan untuk menempatkan diri dalam keseluruhan realitas dan menyadari bahwa kehidupan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sekadar kepentingan manusia.²⁵ Ketika manusia kehilangan orientasi spiritual ini, etika pun terlepas dari sumbernya dan berubah menjadi kalkulasi rasional semata. Paus Fransiskus, dalam *Laudato Si'*, mengajak semua orang beriman untuk menghayati "spiritualitas ekologis," yaitu gaya hidup sederhana, penuh rasa syukur, dan peduli terhadap sesama ciptaan.²⁶ Spiritualitas ini melahirkan 'solidaritas universal': kesadaran bahwa seluruh ciptaan memiliki martabat yang harus dihormati.

Leonardo Boff menggambarkan solidaritas ini sebagai "*komuni kosmik*", di mana manusia, alam, dan Allah saling terhubung dalam jaringan kehidupan yang kudus.²⁷ Dalam spiritualitas ini, tindakan ekologis bukan sekadar kewajiban etis, melainkan bentuk doa dan ibadah: partisipasi manusia dalam karya penciptaan Allah yang berkelanjutan. Dengan demikian, "spiritualitas keberlanjutan" menjadi jiwa dari seluruh etika ekologis. Tanpa spiritualitas, etika mudah berubah menjadi ideologi kering; tanpa etika, spiritualitas kehilangan arah konkret. Maka, keduanya harus berjalan beriringan, menghidupkan panggilan manusia untuk menjaga bumi sebagai ungkapan cinta kepada Pencipta dan kepada sesama.

Kesimpulan

Krisis sosial dan krisis ekologis yang melanda dunia modern, bukanlah persoalan dua yang berdiri sendiri melainkan satu realitas moral yang saling

²⁵ Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 20-21.

²⁶ Paus Fransiskus, *Laudato Si': Tentang Perhatian terhadap Rumah Kita Bersama* (Jakarta: Dokpen KWI, 2015), no. 216-221.

²⁷ Buce A. Ranboki, "Menemukan Teologi Leonardo Boff Dalam Ensiklik Paus Fransiskus *Laudato Si'*," *Indonesian Journal of Theology* 5, no. 1 (Juli 2017): 52.

berkaitan dan menciptakan masalah yang serius. Masalah yang diakibatkan dari kedua krisis ini terletak pada hilangnya kesadaran etis manusia yang enggan bersatu dengan sesama dan dengan alam. Paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat moralitas telah menjadikan pola hidup yang eksploitatif dan individualistis, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan ekologis. Situasi ini disebabkan oleh pembangunan dan kemajuan yang kehilangan orientasi moralnya, karena lebih berfokus pada efisiensi dan keuntungan tanpa peduli terhadap kebaikan bersama dan martabat ciptaan.

Melihat situasi yang begitu serius, perlu adanya tindakan yang dapat meredam fenomena ini. Dalam menanggapi fenomena tersebut, etika keberlanjutan berbasis ekologi integral hadir sebagai paradigma moral baru. Etika ini tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pembaruan hubungan antara manusia dengan seluruh ciptaan. Dengan adanya prinsip ekologi integral yang dikemukakan oleh Paus Fransiskus dan diperkuat oleh teologi Leonardo Boff, membuka pemahaman manusia tentang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis merupakan satu kesatuan moral yang tak terpisahkan. Etika keberlanjutan menekankan tentang relasi antara manusia dengan alam, dan menolak cara pandang yang memisahkan manusia dari alam, serta menyadarkan kembali bahwa manusia adalah bagian dari rumah bersama yang kudus.

Selain itu keadilan sosial dan solidaritas ekologis menjadi dua aspek utama dari tanggung jawab moral manusia. Keadilan sosial lebih menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, sedangkan solidaritas ekologis lebih menegaskan tanggung jawab terhadap seluruh ciptaan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena penderitaan ekologis selalu berdampak pada penderitaan manusia, terutama pada mereka yang miskin dan terpinggirkan. Etika keberlanjutan yang diharapkan, tidak hanya berfokus pada perlindungan bumi, tetapi juga pada perjuangan demi keadilan bagi kehidupan seluruh umat manusia.

Akhirnya, arah dari kajian ini merupakan sebuah seruan moral untuk memperbaharui hubungan dengan sesama dan dengan alam demi mewujudkan masa depan yang adil dan berkelanjutan. Tanggung jawab ini menuntut tanggung jawab moral dan spiritual, agar manusia menyadari akan keberadaannya bukan sebagai penguasa terhadap ciptaan yang lain, melainkan sebagai penjaga dan pelayan kehidupan. Dengan demikian, etika keberlanjutan bukan hanya sebuah wacana teoritis, tetapi merupakan panggilan etis untuk hidup yang baru, di mana manusia, alam, dan seluruh ciptaan hidup dalam harmoni sebagai satu keluarga kosmik di rumah bersama yang penuh kasih.

Daftar Pustaka

- Al Munir, M. Ied. "Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme." *Jurnal Yaqzhan* 9, no. 1 (Juni 2023): 28.
- Atu, Laurentius Florido, dan Petrus Fonsensus Loran Oke. "Hans Jonas dan Tanggung Jawab Etika: Jawaban Atas Krisis Ekologi di Indonesia." *Indonesian Character Journal* 2, no. 1 (Januari 2025): 11.
- Badan Pusat Statistik. "Gini Ratio Maret 2025 Tercatat Sebesar 0,375." BPS, 25 Juli 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2519/gini-ratio-maret-2025-tercatat-sebesar-0-375.html> (diakses 18 Oktober 2025).
- Fransiskus, Paus. *Laudato Si': On Care for Our Common Home*. Vatikan, 2015.
- Fransiskus, Paus. *Laudato Si': Tentang Perhatian terhadap Rumah Kita Bersama*. Jakarta: Dokpen KWI, 2015.
- Gili Leo, Oktavianus. "Berteologi Hijau di Tengah Dunia yang Terluka: Pergeseran Paradigma dari Antroposentrisme menuju Ekosentrisme." *Jurnal Akademika* 24, no. 2 (Januari-Juni 2025): 175.
- Kelvin, Wilhelmus, dan Eugenius M. Darmawan. "Antroposentrisme, Teknokrasi, dan Krisis Pembangunan: Menuju Paradigma Teosentris." *Apostolicum: Jurnal Pendidikan Keagamaan Katolik Ledalero* 1, no. 1 (Maret 2025): 113.
- Magnis-Suseno, Frans. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Magnis-Suseno, Frans. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Magnis-Suseno, Frans. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Magnis-Suseno, Frans. *Etika Sosial: Dasar dan Prinsip Hidup Bersama*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Mangaluk, Efraim. "Deforestasi dan Punahnya Kebudayaan Papua." *Kompas*, 24 Agustus 2024. <https://www.kompas.id/artikel/deforestasi-dan-punahnya-kebudayaan-papua> (diakses 18 Oktober 2025).
- Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi. "Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (Juni 2020): 62-63.
- Ranboki, Buce A. "Menemukan Teologi Leonardo Boff Dalam Ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si'." *Indonesian Journal of Theology* 5, no. 1 (Juli 2017): 52.
- Sobon, Kosmas. "Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafat Emmanuel Levinas." *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 60-61.
- Wenehenubun, Maria Helena. "Pendekatan Ekologi Integral Untuk Mengatasi Krisis Lingkungan Hidup Menurut Paus Fransiskus." *Logos: Jurnal Pendidikan, Katekese, dan Pastoral* 13, no. 1 (Juni 2025): 24, 33, 40.